Determinan Pengangguran di Pulau Sumatera

Muhammad Fauzi¹, Yollit Permata Sari²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: m.fauzi.mf5@gmail.com , yollitpermata@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

8 Agustus 2025

Disetujui:

10 Agustus 2025

Terbit daring:

15 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Fauzi, M. & Sari, Y.P. (2025). Determinan Pengangguran di Pulau Sumatera.

Abstract:

This study aims to examine the impact of unemployment on Sumatra Island from the demand side. The data used is panel data, comprising data from 10 provinces on Sumatra Island from 2015 to 2024. Secondary data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). This research method is quantitative with a descriptive and inductive research approach. This study uses panel data regression analysis, with the best model selected being the Fixed Effect Model (FEM). The results found that the Provincial Minimum Wage has no significant effect on unemployment in Sumatra Island. Education level has a negative and significant effect on unemployment in Sumatra Island. Economic growth has a negative and significant effect on unemployment in Sumatra Island.

Keywords: *Unemployment, provincial minimum wage, education level, economic growth, panel data*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengangguran di Pulau Sumatera dari sisi permintaan. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu berupa data dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menemukan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Pulau Sumatera. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Pulau Sumatera. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Pulau Sumatera.

Kata kunci: Pengangguran, upah minimum provinsi, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, data panel

Kode Klasifikasi JEL: E24, J31, H52

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga tahun 2040, di mana proporsi terbesar penduduk berada pada usia produktif, yaitu 15–64 tahun. Berdasarkan data World Population Review, jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2024 mencapai 283,5 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini dapat memberikan dua sisi dampak terhadap perekonomian nasional. Di satu sisi, kondisi tersebut menjadi peluang karena ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, di sisi lain, lonjakan jumlah penduduk juga berisiko meningkatkan pengangguran apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai (Huda et al., 2018).

Pengangguran sendiri merupakan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan permintaan tenaga kerja di pasar (Evanezza Michael & Caroline Geetha, 2020). Menurut definisi International Labour Organization (ILO), pengangguran adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memenuhi tiga kriteria secara bersamaan: tidak bekerja pada minggu tertentu, bersedia mulai bekerja dalam dua minggu ke depan, serta aktif mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir atau telah memperoleh pekerjaan yang akan

dimulai dalam waktu kurang dari tiga bulan. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), pada tahun 2024 Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN, yakni 5,2%. Meskipun demikian, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan angka pengangguran di Indonesia sejak 2021 hingga 2024, dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 5,86% pada Desember 2022.

Salah satu bentuk pengangguran yang sering terjadi adalah pengangguran terbuka. Jenis pengangguran ini muncul ketika pertumbuhan jumlah lowongan kerja lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja (Arizal & Marwan, 2019). Di Indonesia, permasalahan pengangguran hampir merata di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pulau Sumatera menjadi salah satu kawasan yang hingga kini masih menghadapi persoalan tersebut. Masalah pengangguran di Pulau Sumatera tergolong kompleks, mengingat pulau ini memiliki peran strategis dan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan. Menurut BPS, pengangguran mencakup individu yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak yakin akan memperoleh pekerjaan, serta tidak berkeinginan untuk mulai bekerja.

Jika dilihat dari Gambar 1, tingkat pengangguran di Indonesia selama tahun 2020–2024 berada di bawah 10%. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase pengangguran lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Untuk menggambarkan sebaran jumlah pengangguran di setiap provinsi di Pulau

Sumatera, berikut disajikan ilustrasi persebaran persentase pengangguran pada 10 provinsi di wilayah tersebut.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Pada tahun 2020, Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,34%, yang menunjukkan angka pengangguran yang tergolong sangat tinggi. Data pada gambar 2 juga menggambarkan bahwa persentase pengangguran terbuka di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2020–2024 mengalami perkembangan yang bervariasi dan cenderung berfluktuasi. Peningkatan dan penurunan angka pengangguran di wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja, rendahnya upah minimum provinsi yang memicu migrasi tenaga kerja, serta rendahnya permintaan barang dan jasa yang mendorong produsen mengurangi produksi. Kondisi tersebut berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja dan penurunan produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2024, provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Kepulauan Riau dengan persentase 6,39%, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan persentase 3,11%. Pengangguran dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu dari sisi keinginan pencari kerja (*supply*) dan dari sisi ketersediaan lapangan kerja (*demand*) (Sipayung et al., 2022). Berdasarkan teori permintaan tenaga kerja, tingkat upah yang berlaku dalam suatu periode tertentu akan memengaruhi keputusan perusahaan terkait jumlah tenaga kerja yang akan direkrut (Borjas, 2013). Penelitian ini berfokus pada analisis pengangguran dari perspektif permintaan tenaga kerja.

Parluhutan (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka dari sisi permintaan adalah upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum

memang memberikan keuntungan bagi tenaga kerja, namun di sisi lain dapat menimbulkan beban bagi produsen atau perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sisi penawaran tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi permintaan tenaga kerja di pasar kerja (Sembiring & Sasongko, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Bahira et al. (2023) dan Fahmi (2022) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Sebaliknya, penelitian Harahap (2018) serta Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap pengangguran.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi tingkat pengangguran di Pulau Sumatera adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Dalam prosesnya, produsen menambahkan input agar output yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih tinggi (Sembiring & Sasongko, 2019).

Menurut Muslim (2014), pertumbuhan ekonomi yang kuat di suatu wilayah akan membuka peluang ekspansi usaha bagi perusahaan dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi indikator baiknya kondisi perekonomian, tetapi juga menjadi faktor yang menyediakan peluang kerja. Sebaliknya, penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan adanya peningkatan pengangguran.

Hasil penelitian Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Sementara itu, penelitian Nurhaniyah et al. (2023) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat.

Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat pendidikan. McConnell (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerjanya. Individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mampu bersaing di pasar kerja. Selain itu, pekerja berpendidikan biasanya dapat berpindah pekerjaan tanpa mengalami masa menganggur. Hal ini sejalan dengan penelitian Lavrinovich et al. (2015) yang menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat di Latvia.

Secara garis besar, pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan akhirnya adalah mencetak tenaga kerja yang kompeten, baik dari segi *soft skills* maupun *hard skills*, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga dapat mengurangi risiko pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran di Pulau Sumatera dari sisi permintaan. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatera memang cenderung meningkatkan jumlah pengangguran. Namun, secara regional, kenaikan UMP tidak selalu berdampak pada lonjakan pengangguran, melainkan menunjukkan fluktuasi di berbagai provinsi. Tingginya tingkat pengangguran yang terjadi tentu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Pulau Sumatera.

KAJIAN TEORI

Teori Permintaan Tenaga Kerja

Borjas (2013) mengemukakan bahwa perusahaan mempekerjakan tenaga kerja karena adanya permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja bersifat *derived*

demand atau permintaan turunan, artinya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan bergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tersebut.

Permintaan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi, yang menentukan jumlah output yang dihasilkan melalui kombinasi tenaga kerja dan modal. Hubungan antara permintaan tenaga kerja dan fungsi produksi sangat erat dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal untuk dipekerjakan.

Teori Klasik

Menurut teori klasik Adam Smith (Anggoro, 2015), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Teori ini menekankan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Saat perekonomian tumbuh, aktivitas produksi juga meningkat, sehingga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi yang semakin besar (Rusydan & Wijaya, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan induktif. Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2021 dan Eviews 12, dengan penerapan analisis statistik atau kuantitatif untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2010). Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah data panel, dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebagai data *cross-section* dan periode waktu 2015 hingga 2024 sebagai *time series*.

Metode analisis meliputi pemilihan model terbaik, uji T, uji F, dan penghitungan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan software Eviews 12. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel bebas yang digunakan terdiri dari upah minimum (X1), tingkat pendidikan (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3), sedangkan variabel terikat adalah pengangguran (Y). Model analisis regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$TPT_{it} = a + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 PE_{it} + e_{it}$$

Dimana:

TPT = Pengangguran Terbuk

UMP = Upah Minimum

TP = Tingkat Pendidikan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien variabel bebas

a = Konstanta

i = Provinsi – Provinsi yang ada di Pulau Sumatera

t = tahun (2015–2024)

e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pemilihan Model

Alat Uji	Chi-Square Statistic	Probabilitas	Keputusan
Chow	89.934233	0.0000	Fixed Effect Model
Hausman	28.468449	0.0000	Fixed Effect Model

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1, nilai probabilitas Uji Chow sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga model yang sesuai adalah *fixed effect model*. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, yang kembali mengindikasikan bahwa *fixed effect model* merupakan pilihan yang tepat. Dengan demikian, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.606774	10.21101	0.940825	0.3493
LOGUMP	0.505737	0.992441	0.509589	0.6116
TP	-1.242540	0.604245	-2.056349	0.0427
PE	-0.197951	0.040429	-4.896291	0.0000
R-squared			0.736909	
F-statistic			24.10797	
Prob(F-statistic)			0.00000	

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil regresi estimasi Fixed Effect Model pada tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut

$$TPT = 9.606 + 0.505*LOGUMP - 1.242*TP - 0.197*PE$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 9,606 menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari upah minimum, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 9,606 persen. Nilai probabilitas F sebesar $0,00 < 0,05$ mengindikasikan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,73 menunjukkan bahwa 73% variasi tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan 27% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa UMP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera. Hal ini ditunjukkan

oleh nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,505%. Artinya, meskipun secara teori peningkatan upah dapat mendorong perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga pengangguran meningkat, pada kenyataannya hal tersebut tidak terbukti signifikan dalam penelitian ini.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Apriliana dan Setyawijaya (2024) yang menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ketidakberpengaruh ini disebabkan oleh fakta bahwa kenaikan upah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pengangguran, karena kebutuhan tenaga kerja tetap tinggi seiring dengan bertambahnya produksi. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha mencari strategi untuk menutupi biaya tambahan akibat kenaikan upah tahunan, sehingga tidak serta-merta mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Bahira (2023) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara UMP dan tingkat pengangguran. Secara teoritis, kenaikan upah minimum dapat menciptakan rigiditas di pasar tenaga kerja. Setiap kali UMP meningkat, perusahaan cenderung mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya, yang pada akhirnya dapat menambah jumlah pengangguran. Kenaikan upah juga meningkatkan penawaran tenaga kerja, sementara permintaan tenaga kerja justru menurun, sehingga menimbulkan surplus tenaga kerja atau pengangguran.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0,197 dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, yang berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan indikator laju pertumbuhan PDRB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi di setiap provinsi. Peningkatan kapasitas ini mendorong kebutuhan perusahaan untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja dalam proses produksi (Rozaini & Sinaga, 2023), sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, peluang kerja akan berkurang dan pengangguran cenderung meningkat, mengingat tenaga kerja yang bekerja menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi produktif.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Soylu et al. (2018) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di negara-negara Eropa Timur. Dalam penelitian tersebut, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan PDB dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,08 persen.

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Bahira, Perwithosuci, & Apriani (2023) serta Nurhaniyah et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik pertumbuhan ekonomi yang lebih mengandalkan teknologi dibandingkan tenaga kerja, sehingga peningkatan output tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap sejalan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Pulau Sumatera

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Pulau Sumatera. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar -1,242 dengan tingkat signifikansi $< 0,05$, yang berarti peningkatan tingkat pendidikan akan diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran.

Menurut McConnell et al. (2006), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula produktivitas yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, individu berpendidikan tinggi memiliki kemampuan bersaing yang lebih kuat di pasar tenaga kerja. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Lavrinovicha et al. (2015) yang menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran dan pendapatan di Latvia. Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, di mana setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,63 persen.

Dengan kata lain, angkatan kerja di Pulau Sumatera yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Peningkatan tingkat pendidikan akan memperkecil peluang terjadinya pengangguran karena lulusan berpendidikan tinggi memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih diminati oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan teori permintaan tenaga kerja yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas, sehingga memperbesar peluang seseorang untuk direkrut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula permintaan terhadap tenaga kerja tersebut di pasar kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model terbaik, yaitu *Fixed Effect Model*, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera.

Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Pulau Sumatera.

Ketiga, tingkat pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Pulau Sumatera.

Secara simultan, hasil uji signifikansi (uji F) menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Sumatera, dengan nilai F-statistik sebesar 0,000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,73% mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan variasi pengangguran di Pulau Sumatera tergolong sangat kuat.

DAFTAR RUJUKAN

Anggoro, M. H. , & S. Y. (2015). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA SURABAYA. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 3.

Apriliansa, S., & Setyawijaya, R. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Propinsi Banten*. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i>

- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- Bahira, A. R. , P. W. , & A. A. R. (2023). Determinants of Educated Unemployment in West Jawa. *International Economics and Business Conference (IECON)*,.
- Borjas, G. J. (2013). *Labor Economics* (6 ed). Douglas Reiner.
- Fahmi, M. P. (2022). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4, 76–87.
- Harahap, E. F. (2018). Study of Minimum Wage, Level of Education, Employment Opportunity, and Unemployment Educated: Empirical Study in Padang. *European Journal of Business and Management*, 10, 38–43.
- Lavrinovicha, I., Lavrinenko, O., & Teivans-Treinovskis, J. (2015). Influence of Education on Unemployment Rate and Incomes of Residents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, 3824–3831. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1120>
- McConnell, C. R. , B. S. L. , & M. D. A. (2006). *Contemporary Labor Economics* (Seventh Edition). McGraw-Hill.
- Muslim, M. R. (2014). PENGANGGURAN TERBUKA DAN DETERMINANNYA. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15, 171–181.
- Nurhaniyah, N. , K. S. , P. M. , K. E. P. , & L. N. (2023). Determinant of Educated Unemployment Rate in West Kalimantan: Case Study in Border Area. *Journal of Economics, Management and Trade*, 29, 175–183.
- Parluhutan, P., Junaidi, J., & Prihanto, P. H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(3), 133–140. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i3.20>
- Rahmawati, F. N. , P. D. S. , & P. M. (2023). Determinants of Educated Unemployment in Java from 2016 to 2022. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 6, 114–124.
- Rusydan, R. M., & Wijaya, R. S. (2024). Impact of Economic Growth, Minimum Wage, Labor Force Participation Rate, and Population Size on the Open Unemployment. *Journal of Business Management and Economic Development*, 2(03), 1186–1198. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i03.911>
- Sembiring, V. B. P., & Sasongko, G. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 430. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21505>
- Sipayung, F. L., Wijaya, A. F., Putra, F., & Aratame, N. (2022). Analyzing the Characteristics of Highly Educated Unemployment in Indonesia's Capital City. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 153. <https://doi.org/10.17977/um002v14i22022p153>
- Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.